



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat	: Ke – 5 (Lima)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT PLN (Persero)
Hari, tanggal	: Rabu, 22 April 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 14.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Dampak pandemic Covid-19 terhadap kinerja PT PLN (Persero) di sektor kelistrikan. 2. Kontribusi PT PLN (Persero) terhadap penanganan pandemic Covid-19. 3. Penerapan dan dampak dari kebijakan keringanan biaya listrik.
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 33 Orang dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 1 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 32 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 19 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari ini Rabu, 22 April 2020 dibuka pukul 11.00 WIB yang dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Dampak pandemic Covid-19 terhadap kinerja PT PLN (Persero) di sektor kelistrikan.
 - b. Kontribusi PT PLN (Persero) terhadap penanganan pandemic Covid-19.
 - c. Penerapan dan dampak dari kebijakan keringanan biaya listrik.
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Direktur Utama PT PLN (Persero) mengenai:
 - a. Secara khusus sebagaimana Agenda rapat kita pada hari ini, Komisi VII DPR RI ingin mendalami mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap kinerja PT PLN (Persero). Selain itu, Komisi VII DPR RI juga ingin mengetahui mengenai kontribusi nyata yang telah dan akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) terhadap penanganan pandemi Covid-19.
 - b. Kemudian, Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan yang mendetail dan komprehensif mengenai penerapan dan dampak dari penggratisan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 900 VA melalui PT PLN (Persero) sesuai Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
4. Penjelasan Direktur Utama PT PLN (Persero) sebagai berikut:
 - a. Dampak pandemic Covid-19 terhadap kinerja PT PLN (Persero) di sektor kelistrikan:
 - ✓ Pandemi COVID-19 menyebabkan terdisrupsi rantai pasok dan perdagangan internasional karena adanya pembatasan pergerakan fisik untuk mencegah penyebaran virus sehingga bisnis dan industri dunia mengalami perlambatan .
 - ✓ COVID-19 diprediksi kuat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi global dan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi
 - ✓ Berbagai lembaga dunia telah mempublikasikan update prediksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara terdampak COVID-19
 - ✓ Salah satunya The Economist Intelligence Unit pada Maret 2020 telah merilis revisi pertumbuhan ekonomi dunia: Indonesia diprediksi

menjadi 1% dari 5,1% namun tetap Positif, sama dengan China, dibawah 1,1% dari India. Sementara di sisi lain banyak negara lain diprediksi pertumbuhan ekonominya Negatif.

- b. Kontribusi PT PLN (Persero) terhadap penanganan pandemic Covid19:
- ✓ Bantuan APD yang dimaksud adalah masker bedah, masker N95, sarung tangan, sarung sepatu, kacamata, hand sanitizer dan lainnya
 - ✓ Bantuan ini disalurkan di Rumah Sakit, di Puskesmas yang berada di Jakarta Barat, dan beberapa lokasi lainnya
 - ✓ Bantuan alat desinfektan ini berupa sprayer, cairan desinfektan dan alat pelindung/ kacamata
 - ✓ Bantuan ini disalurkan ke tempat ibadah, sekolah, lingkungan warga yang membutuhkan untuk mensterilkan lingkungan sekitar
 - ✓ Bantuan makanan sehat ini diproduksi oleh TRC Bersama Asosiasi Chef Indonesia, memproduksi 11.000 makanan
 - ✓ Bantuan ini disalurkan untuk warga sekitar dan warga PLN yang sedang bertugas melistriki
 - ✓ Bantuan wastafel cuci tangan disiapkan warga yang harus mencuci tangan sesering mungkin agar tetap bersih menjaga Kesehatan
 - ✓ Bantuan ini disalurkan untuk warga sekitar, poliklinik dan kelurahan Jakarta Selatan
- c. Penerapan dan dampak dari kebijakan keringanan biaya listrik.

SASARAN:

Pelanggan R1/450:

- ✓ Pascabayar: 15,99 Juta Pelanggan
- ✓ Prabayar: 7,86 Juta Pelanggan
- ✓ Total Pelanggan: 23,85 Juta Pelanggan

Pelanggan R1/900: •

- ✓ Pascabayar: 3,30 Juta Pelanggan
- ✓ Prabayar: 4,03 Juta Pelanggan
- ✓ Total Pelanggan: 7,33 Juta Pelanggan

Total Pelanggan PLN Terdampak: 31,17 Juta Pelanggan

PROGRESS:

PASCA-BAYAR

Progress Pelunasan terhadap seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan diskon 50% pelanggan rumah tangga daya 900 VA subsidi Per tagihan April telah selesai 100%

PRA-BAYAR

Progress Penerbitan Token gratis seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan diskon 50% pelanggan rumah tangga daya 900 VA subsidi Periode April telah selesai 100%, diproses dari tanggal 1 April s/d 9 April 2020 secara bertahap

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) yang telah secara aktif bersama-sama Pemerintah mengatasi meluasnya penyebaran Covid-19 dan dampak-dampaknya.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan pembayaran kompensasi kepada PT PLN (Persero) atas penggratisan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA tidak mampu sesuai Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk mempersiapkan dan melakukan langkah langkah strategis termasuk tindakan efisiensi dalam menghadapi penurunan *demand* kelistrikan dan akibat-akibat lainnya sebagai dampak dari pandemik Covid-19.
4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk mengkaji dan mereview kembali proyek strategis di sektor kelistrikan dan melakukan renegotiasi kontrak pembangkit listrik apabila diperlukan.
5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk memberikan laporan terkait data proyek proyek yang mangkrak dan prognosa kinerja keuangan PLN secara menyeluruh dan disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.

6. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk meminta Pemerintah membayar tunggakan kompensasi listrik tahun 2018 dan 2019.
7. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menjajaki peluang pendanaan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bilamana nanti dibutuhkan untuk mengatasi defisit *cashflow* di PT PLN (Persero).
8. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 29 April 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.30 WIB

Jakarta, 22 April 2020

KETUA RAPAT,

DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)

Ir. ZULKIFLI ZAINI, MBA

H. EDDY SOEPARNO, SH, MH
A-496